



Buletin Parlementaria

Nomor 973/IV/VIII/2017 • Agustus 2017



**Pakaian Adat Warnai
Sidang Tahunan MPR, DPR & DPD RI
Pansus Angket KPK Sambangi Rumah
Sekap di Depok dan Kelapa Gading**

Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Harus Diwaspadai

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Harus Diwaspadai

Realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal II Tahun 2017 sebesar 5,01 persen tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama pada Tahun 2016, yaitu sebesar 5,18 persen. Pelambatan konsumsi rumah tangga menyumbang penurunan pertumbuhan Kuartal II Tahun 2017. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini harus diwaspadai.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima RUU APBN TA 2018 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung dari Presiden RI Joko Widodo

“Kondisi ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan, sehingga kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pendapatan nasional tetap terjaga,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 – 2018 dalam rangka penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Fadli menambahkan, alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat gencar saat ini harus segera dilakukan, sehingga diharapkan ketergantungan anggaran infrastruktur dari APBN berkurang dan dapat dialokasikan kepada program yang mampu menstimulus sisi konsumsi dan produksi.

“Dengan demikian, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama perekonomian dapat terjaga,

namun keinginan pemerintah untuk menambah penggerak pertumbuhan ekonomi baru dari sisi investasi juga dapat terwujud,” imbuh Fadli.

Selain alternatif pembiayaan infrastruktur, lanjut Fadli, pemerintah juga harus mampu menentukan prioritas pembangunan infrastruktur mana yang mampu menstimulus roda perekonomian, sehingga manfaat infrastruktur yang dibangun dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan mampu menjadi alat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Dampak dari pemulihan perekonomian global terhadap Indonesia harus senantiasa dicermati. Pemulihan harga komoditas internasional harus direspons dengan melakukan peningkatan nilai barang yang dijual, sehingga mampu menggerakkan sisi produksi dalam menghasilkan barang jadi,” jelas Fadli.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, pemulihan perekonomian di beberapa negara maju, terutama Amerika Serikat, juga harus diantisipasi dampaknya

terhadap *capital outflow* dari Indonesia. Dana yang keluar akan berdampak pada kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

“APBN Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat mengakselerasi perekonomian nasional sehingga Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi berbagai macam perubahan, baik yang disebabkan oleh faktor global maupun dalam negeri,” harap Fadli.

Pengelolaan utang juga harus mendapat perhatian agar di kemudian hari tidak membebani Indonesia. Meskipun rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada dalam kisaran yang aman, namun pemerintah wajib mewaspadai komposisi kepemilikan surat utang negara maupun obligasi oleh asing agar tidak mengganggu kestabilan nilai tukar rupiah pada saat jatuh tempo.

Fadli mengingatkan, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah alokasi dana desa. Meskipun telah mengalami peningkatan yang signifikan, masih terdapat beberapa persoalan yang harus segera dituntaskan, antara lain masih maraknya penyimpangan dan lambannya penyerapan karena tumpang tindihnya aturan.

“Untuk itu, dewan menghimbau agar dalam mengalokasikan dana desa, pemerintah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat luas,” dorong politisi asal dapil Jawa Barat.

Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 ini patut disyukuri, bahwa hingga saat ini telah banyak pencapaian yang diraih dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh membuat berpuas diri. Oleh karena itu, Pimpinan DPR RI mendukung sepenuhnya tema yang dipilih oleh pemerintah untuk merayakan hari kemerdekaan tahun ini, yaitu ‘Indonesia Kerja Bersama’.

“Dewan berharap hal ini dapat merepresentasikan semangat gotong royong yang dimiliki oleh bangsa kita untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” harap Fadli.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri dan Anggota Kabinet Kerja, Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara Sahabat, serta teladan dari berbagai bidang. ■



DPR Terus Menjadi Lembaga Representasi Rakyat Modern

Di depan Sidang Tahunan MPR-RI 2017 yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh lembaga negara, atas kekompakan, atas sinergi dan atas kerja sama yang baik selama ini. Jokowi meyakini dengan kekompakan, dengan sinergi, dengan kerja bersama, tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh setiap lembaga negara, tetapi justru memperkuat semua dalam memenuhi amanah rakyat.

Jokowi juga menyampaikan tugas sejarah untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif Lembaga-Lembaga Negara. Dia juga menyampaikan saat ini DPR terus berusaha menjadi lembaga representasi rakyat yang modern. "Sementara itu, DPR juga terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya," ungkap Jokowi di hadapan para Anggota Sidang Tahunan MPR-RI 2017, Ruang Rapat Paripurna, Rabu (16/8).

Terhadap fungsi legislasi, Presiden menyampaikan, DPR telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017. Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program Pemerintah selama tahun 2017 seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi.

Adapun terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu; serta Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. DPR juga memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 23 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

Yang tidak kalah penting adalah DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat guna memperjuangkan kepentingan nasional dan pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional. Diplomasi itu dilakukan melalui Grup Kerja Sama Bilateral DPR dengan Parlemen Negara-negara Sahabat. DPR saat ini telah membentuk 49 Grup Kerja Sama Bilateral serta berperan aktif dalam forum kerja sama antar-parlemen internasional. ■

(eko.mp), Foto: Arief/ahr



Suasana Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Akza Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon Yuliana Puspita,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Pakaian Adat Warnai Sidang Tahunan MPR, DPR & DPD RI



Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat



Berbeda dengan suasana Pidato Kenegaraan Presiden tahun sebelumnya, rangkaian acara menyambut HUT RI ke-72 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2017 Rabu (16/8) kali ini diwarnai dengan pakaian adat nusantara. Presiden Joko Widodo yang asli Jawa mengenakan pakaian adat Bugis, sementara Wapres Jusuf Kalla yang asal Bugis mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan blankonnya.

Selain Presiden dan Wakil Presiden, pakaian adat dari seluruh penjuror negeri ini juga dikenakan para penyambut tamu di depan pintu masuk Gedung Utama tempat presiden menyampaikan pidato kenegaraan. Suasana khas ini menyita perhatian para anggota MPR, para undangan termasuk Duta Besar Negara sahabat, para Menteri Kabinet Kerja serta mantan Presiden Megawati Soekarnoputeri, BJ Habibie dan mantan Wapres Boediono dan Tri Soetrisno serta mantan Ketua DPR Akbar Tanjung dan Agung Laksono serta undangan lainnya.

Secara khusus Ketua MPR Zulkifli Hasan menyambut hangat Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat Bugis dan Wapres Jusuf Kalla yang mengenakan pakaian adat Jawa. "Terima kasih Pak Presiden yang mengenakan pakaian adat Bugis dan Pak JK yang mengenakan pakaian adat Jawa," katanya disambut tepuk tangan hadirin di Ruang Paripurna.

Pesan yang bisa dipetik dari pakaian adat ini adalah sebagai penangkal munculnya isu intoleran akhir-akhir ini dan penekanan pentingnya soal kebhinekaan. Sebagaimana ditegaskan Ketua MPR dalam pidatonya,

"Kita tidak boleh membiarkan Indonesia ini robek dan koyak. Kita tidak boleh membiarkan Pancasila dan UUD 1945 dicampakkan atau hanya menjadi simbol. Pancasila dan UUD 1945 adalah kesepakatan bersama dan rujukan bersama dalam bernegara dan dalam berindonesia. Itu tidak bisa ditawar-tawar dan menjadi harga mati. Ihwal ideologi negara, falsafah negara, dan dasar negara telah final, ujunya menegakkan.■

(mp), Foto: Andri/hr

Gerakan Pramuka Harus Diterima Generasi Milenial

Tanggal 14 Agustus, diperingati sebagai hari jadi Gerakan Pramuka yang ke-56. Sejak diperkenalkan pada 14 Agustus 1961, Praja Muda Karana (Pramuka) yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya ini harus diterima oleh generasi milenial dan mampu memberi kontribusi bagi bangsa dan negara.



Ketua DPR RI Setya Novanto

Ketua DPR RI Setya Novanto menyerukan hal tersebut dalam rilisnya, Senin (14/8). Gerakan kepanduan yang dipelopori kaum muda tersebut punya andil dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

“Di masa kini, setidaknya ada dua tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Maraknya peredaran narkoba dan ancaman disintegrasi bangsa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan masa depan bangsa. Karena itu, kegiatan kepramukaan sangat penting bagi anak-anak Indonesia,” katanya.

Dengan sistem nilai yang didasarkan pada Satya dan Darma Pramuka, jiwa-jiwa

muda dididik akhlak, watak, serta budi pekerti yang luhur. Tak hanya itu, Pramuka juga mengajarkan sikap patriotik, nasionalisme, dan bersahabat dengan alam. Dari gerakan pramukalah tumbuh tunas bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bertanggungjawab, serta mampu mengisi kemerdekaan dengan karya yang positif.

Pramuka dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi dan teknologi kontemporer. Lewat media sosial, pramuka juga harus mengkampanyekan inspirasi positif bagi kaum muda, sehingga pramuka bisa hadir dan diterima di tengah generasi milenial.

“Di hari jadi pramuka yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terimakasih atas pengabdian yang tulus kepada seluruh Pembina Pramuka dari tingkat gugus depan hingga kwartir nasional,” ucap Novanto.

DPR RI, sambungnya, terus memberikan dukungan kepada gerakan pramuka sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter dan jati diri kaum muda. Melalui fungsi anggaran, pramuka mendapatkan total anggaran negara sebesar Rp 34 miliar. Tak menutup kemungkinan, jika pada tahun mendatang anggaran tersebut bisa dinaikan, seiring banyaknya kegiatan positif yang dilakukan pramuka. ■

(mh) Foto: Iwan/hr

Kinerja Makro Ekonomi Gagal Membaca Dinamika Rumah Tangga

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan penilaian atas capaian pemerintah yang selalu mengandalkan data makro sebagai rujukan capaian pembangunan. Pemerintah dinilai tidak mampu membaca dinamika ekonomi rumah tangga atau individu secara keseluruhan. Hal itu dibuktikan dengan masih mudah ditemukannya kemiskinan di berbagai daerah terpencil di Indonesia.

Oleh karena itu menurutnya sangat diperlukan ragam indikator baru untuk membaca tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih konkrit. Ia menegaskan dalam dua tahun terakhir *concern* dalam menyusun kerangka tersebut.

“Kami sedang menyusun atau membangun indikator kesejahteraan rakyat yang lebih konkrit. Kita sedang diskusi selama dua tahun dalam menyusun kerangka. Seiring berjalan waktu banyak yang diupdate,” ujar Fahri dalam acara Coffee Morning dengan tema ‘Menurunnya Daya Beli Masyarakat’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Menurut Fahri pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen di kuartal dua Tahun 2017 tidak sejalan dengan tingkat daya beli masyarakat yang menurun. Karena itu, Fahri menyebut ada satu anomali yang terjadi dalam konsumsi masyarakat. “Hari ini kita menemukan satu persoalan tengah ramai yaitu perdebatan yaitu



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam acara Coffe Morning dengan tema "Menurunnya Daya Beli Masyarakat".

menurunnya daya beli yang dibandingkan dengan angka makro," ungkap Fahri.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Saleh P. Daulay yang turut serta dalam kegiatan tersebut, ia mengemukakan usai berkeliling ke dapil masih sangat mudah menemukan kemiskinan.

Alokasi dana dari pusat ke daerah dinilai tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan daya beli baru, sehingga hal ini menjadi pertanyaan

besar tentang sistem kerja pemerintah. "Uang sudah banyak habis tapi kok tingkat pendapatan rendah. Dana desa Rp 800 juta tidak menciptakan lapangan kerja baru. Ini tidak menciptakan kesejahteraan yang menciptakan daya beli baru," ujar Saleh.

Meskipun seringkali pemerintah merilis optimisme kinerja makro ekonomi, namun hal itu nampaknya tidak berdampak banyak terhadap fakta lapangan yang menurut kacamata mikro

sangat mudah kemiskinan dijumpai di pelosok daerah.

Oleh karenanya, Fahri Hamzah berkomitmen ingin membuat sebuah metode penghitungan kesejahteraan untuk masyarakat yang lebih konkrit melihat kenyataan riil. "Kita sedang memotret kenapa kinerja makro sering gagal membaca dinamika rumah tangga atau individu masyarakat kita. Nah kita fokus pada penurunan daya beli," tukas fahri. ■

(hs), Foto: Ojijhr



Wakil Ketua DPR Korpolkam, Fadli Zon menerima Ketua Persatuan dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir dan jajarannya

Kasus Penangkapan Mahasiswa Indonesia Jangan Terjadi Lagi

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyayangkan kembali terjadinya penangkapan mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) di Mesir. Awal Juli lalu, Fadli menerima keluarga dan tim pengacara dari empat mahasiswa WNI yang ditangkap oleh otoritas keamanan Mesir. Dan kini, ia menerima laporan ditangkapnya dua mahasiswa WNI di Mesir. Ia meminta hal ini tidak terjadi lagi.

Demikian dikatakan Fadli usai menerima Ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir dan jajarannya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/8). Dalam kesempatan itu, PPMI melaporkan dua mahasiswa WNI ditangkap oleh Aparat Keamanan Mesir saat berada di Kota Samanud. Diketahui, Kota Samanud menjadi perhatian khusus dari Mesir, karena dianggap kawasan Ikhwanul Muslimin, organisasi yang dipimpin Mohamed Mursi.

“Ada kasus dua mahasiswa lagi yang ditangkap. Mereka ini adalah mahasiswa yang mengambil barang di Kota Samanud, kemudian ditangkap ketika sedang belanja di toko. Padahal tidak ada perbuatan melawan hukum. Saya kira ini yang harus dibantu maksimal Kedutaan Besar Republik Indonesia

(KBRI) kita, sebagai ujung tombak untuk melindungi para pelajar Indonesia di Mesir, yang jumlahnya mencapai 4000-an mahasiswa,” jelas Fadli.

Kasus ini menurut politisi F-Gerindra itu, hampir sama dengan kasus empat mahasiswa yang ditangkap awal Juli lalu. Mahasiswa itu ditangkap, tanpa ada kejelasan hukum dan keterangan yang jelas. Menanggapi hal itu, ia akan mengundang Dubes RI untuk Mesir, termasuk Dubes Mesir untuk Indonesia, guna membahas permasalahan itu.

“Nanti di DPR tentu akan saya melanjutkan ini ke Dubes kita untuk Mesir, Komisi I DPR dan jika memungkinkan saya akan undang Dubes Mesir untuk Indonesia, supaya kasus ini tidak terjadi berulang. Jangan sampai ada kriminalisasi dan salah tangkap lagi,” pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Ketua PPMI Mesir Pangeran Arsyad Ihsanulhaq melaporkan bahwa dua mahasiswa WNI ditangkap aparat keamanan Mesir pada tanggal 1 Agustus 2017 lalu. Keduanya ditangkap saat berada di Kota Samanud, sekitar tiga jam perjalanan dari Mesir. Muhammad Hadi dan Nurul Islami merupakan mahasiswa Universitas Al Azhar, berasal dari Sumatera Barat. Arsyad memastikan, dokumen para mahasiswa ini cukup lengkap.

Arsyad menjelaskan kronologi kejadian bermula saat ada evakuasi kepada mahasiswa Mesir yang ada di Samanud. Namun karena evakuasi berlangsung terburu-buru, keduanya belum membawa barang-barang pribadinya. Kemudian karena keduanya berencana untuk pulang ke Indonesia, mereka hendak mengambil barang-barang yang berada di flat, di Samanud.

“Saat mereka berada di Samanud karena hendak mengambil barang, ditangkap aparat keamanan. Kami prihatin dengan kondisinya, karena belum ganti baju dari 1 Agustus lalu. KBRI sudah melakukan himbauan, tetapi dua mahasiswa itu bukan mau tinggal di sana, tapi mengambil barang yang ada di flatnya. Kami melihat tidak ada ancaman di Samanud, karena hal itu persoalan politik dalam negeri, dimana Samanud menjadi basis Mursy,” jelas Arsyad.

Arsyad berharap, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus dan berusaha membebaskan mahasiswa yang ditangkap. Ia mendapat informasi, KBRI telah membentuk tim pengacara untuk membebaskan para mahasiswa, dan sudah bertemu dengan dua mahasiswa itu setelah 12 hari penangkapan.

“Tapi belum tampak hasil yang signifikan dari pertemuan tersebut. Status belum jelas, apakah dapat bebas, atau terancam dideportasi. Jika deportasi, maka pendidikan tidak bisa dilanjutkan. Harapan kami, karena mereka tidak terlibat apapun, agar diberikan bantuan. Karena sejak ditangkap sejak 1 Agustus lalu, mereka tentu sangat mendapatkan pengalaman yang buruk,” jelas Arsyad.

Arsyad menambahkan, Samanud menjadi salah satu daerah favorit mahasiswa Mesir karena biaya hidup yang murah. Kendati jaraknya jauh dari kampus di Kairo, tetap menjadi pilihan, karena mahasiswa tak diwajibkan setiap hari untuk belajar di kampus. ■

(isi.mpi), Foto: Arif/Infra



72 Tahun Indonesia Kerja Bersama Wujudkan Kemakmuran Rakyat

Tema "72 Tahun Indonesia Kerja Bersama" yang diusung pemerintah dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dimaknai Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

“Tema tersebut kurang lebih bermakna, bahwa bangsa dan rakyat Indonesia, harus bersama-sama bekerja, membangun untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak. Hal ini merupakan representasi dan filosofi semangat gotong royong, untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” kata Fahri dalam sambutannya saat menjadi Inspektur Upacara Bendera Peringatan HUT RI ke 72 di Komplek Parleman, Senayan, Jakarta, Kamis (17/8).

Di hadapan peserta upacara, Fahri menjelaskan, bahwa Indonesia telah melewati kondisi yang sulit, cobaan,

ujian dan dinamika serta pergolakan ide bahkan pergolakan fisik. Ujian pada ideologi bangsa, ujian pada dasar negara, ujian pada kebersamaan, ujian pada keberagaman, ujian pada wilayah dan ujian pada ide dan cita-cita Indonesia.

Ia mengajak semua lapisan masyarakat agar memandang optimis masa depan bangsanya menyatukan langkah, menggalakkan nilai-nilai fondasi bangsa untuk terus melangkah menyongsong masa depan negara.

Dalam konteks fungsi legislatif, ia menegaskan, lahirnya parlemen yang modern adalah tonggak lahirnya daulat rakyat. Modernitas parlemen akan



Upacara Kemerdekaan HUT RI di Halaman Gedung Parlemen

berefek pada efektifnya pengawasan, efektifnya penyusunan undang-undang, dan efektifnya pembahasan-pembahasan anggaran yang representatif, yang mencerminkan keinginan rakyat Indonesia. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa bekerja di lembaga negara adalah kerja mulia untuk melanjutkan cita-cita bangsa. ■

(eko.mp), foto : andri/hr

Komisi III Terima Keluhan Jajaran Peradilan Sulut

Komisi III DPR melakukan pertemuan dengan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Pengadilan Negeri Manado, Ketua Pengadilan Agama Manado, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer III-17 Manado beserta jajarannya. Pertemuan dalam rangkaian kunker ini dimaksudkan untuk menggali masukan dan informasi mengenai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Utara.



Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i dalam acara ini mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan informasi personil hakim yang minim, sarana dan prasarana yang tidak mencukupi dan masih banyak kantor yang ngontrak karena tidak ada rumah dinas.

“Walau dengan tantangan besar mereka (jajaran peradilan) tetap saja menginginkan agar ada penambahan hakim, penambahan fasilitas gedung peradilan dan rumah jabatan,” papar M. Syafi'i di Manado, Rabu (9/8).

Lebih lanjut, ada hal yang

dipaparkan membuat miris, ketika ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pengadilan tidak bisa mengeksekusinya. Hal ini dikarenakan peradilan berada dibawah ancaman ketika akan mengesekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Yang juga dikeluhkan, lanjut dia, ketika pengadilan meminta bantuan kepada kepolisian lebih sering mengabaikan permintaan tersebut. Selain itu, petugas pengadilan merasa sangat tidak nyaman karena ada tekanan dari pihak-pihak eksternal pada waktu akan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang sudah incracht atau berkekuatan hukum tetap.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga telah mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Kepolisian (Kapolda) Sulawesi Utara, yang katanya hanya koordinasi saja yang kurang terjalin dengan baik.

“Karena salah satu tupoksinya mengawal hakim dalam melaksanakan tugasnya dan mengawal eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ke depan mereka berjanji akan meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak peradilan,” ungkapny. ■

(as.mp) Foto: Agung/hr

Anggaran Kesehatan Belum Maksimal

Menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun, refleksi atas capaian di bidang kesehatan mendapat sorotan. Saat ini, anggaran kesehatan memang sudah mencapai lima persen sesuai amanat UU Kesehatan, namun faktanya belum maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.



Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan

Anggaran kesehatan dalam APBN 2017 sebesar Rp 104 triliun, meningkat menjadi Rp 500 miliar dari RAPBN 2017. Anggaran sektor kesehatan sebesar lima persen dari total belanja pemerintah Rp 2.080,5 triliun ini, dinilai anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan belum diserap dengan baik oleh Kementerian Kesehatan.

Ayub mengatakan, Komisi IX dan Kemenkes sudah memperjuangkan anggaran tersebut sesuai amanat UU. "Capaian kesehatan di HUT 72 tahun Indonesia merdeka ini, Komisi IX sudah memperjuangkan peningkatan layanan kesehatan lewat BPJS," ucapnya, Rabu,

(16/8).

Politisi Partai Demokrat itu, menyerukan agar Kemenkes memaksimalkan pelayanan kesehatan, sarana prasarana, dan juga kepesertaan BPJS. Fakta lain ditunjukkan Ayub, misalnya, Komisi IX sudah mendesak Kemenkes untuk terus menekan angka kematian ibu dan bayi, termasuk peningkatan gizi masyarakat.

"Untuk tahun ini sudah mencapai Rp 1 triliun anggaran untuk makanan sehatnya saja. Belum yang lain-lain. Komisi IX sudah memaksimalkan masalah anggaran dan sudah mencapai lima persen sesuai amanah UU," tegas Ayub lagi. Harusnya,

lanjut Ayub, sudah banyak yang diperbuat Kemenkes dengan anggaran lima persen tersebut. Namun, pada kenyataannya masih banyak kekurangan. Fasilitas kesehatan masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Politisi dari dapil Jatim IV ini, menyebutkan, masalah distribusi obat-obatan yang kerap terlambat dan tarif kesehatan yang masih membebani masyarakat, jadi masalah kesehatan di daerah. Dengan anggaran lima persen untuk sektor kesehatan yang sudah terpenuhi sejak setahun yang lalu, mestinya tak ada lagi keluhan kesehatan yang dialami masyarakat. ■

(mh,mp). Foto: Dep/hr

Pembangunan Merata Harus Ada Dalam Kerja Nyata



Anggota Komisi III DPR Arsul Sani

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI berbeda dengan pidato yang disampaikan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini lanjutnya, presiden menghadirkan data yang sifatnya kuantitatif, tidak hanya makro tetapi mikro. Contohnya presiden menyampaikan mengenai stabilisasi harga semen di Papua sehingga mereka menikmati pembangunan. Rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada Maret 2017 sehingga desa-desa kini sudah menikmati listrik.

"Data itu yang membuat pidato Presiden lebih berisi dan lebih menarik. Dalam pidatonya presiden juga berpesan kepada rakyat Indonesia bahwa pembangunan yang sedang



"Masyarakat jangan mengeluh jika ada pelambatan ekonomi di Pulau Jawa, karena sedang dilakukan ekonomi berbagi atau pemerataan pembangunan"

dijalankan oleh pemerintahan saat ini adalah pembangunan yang bersifat merata, jadi tidak hanya di Pulau Jawa saja," kata Asrul di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Melalui pidato tersebut, presiden juga ingin meminta pengertian dari masyarakat Indonesia yang berdiam diri di Pulau Jawa agar memahami apabila ada pelambatan ekonomi di Pulau Jawa. "Masyarakat jangan mengeluh jika ada pelambatan ekonomi di Pulau Jawa, karena sedang dilakukan ekonomi berbagi atau pemerataan pembangunan," pungkasnya.

Politisi partai PPP itu berharap pemerataan pembangunan yang dicanangkan Jokowi benar-benar terealisasi tidak hanya ada di dalam pidato tetapi ada dalam kerja nyata.

Di tempat yang sama Anggota DPR Budiman Sudjatmiko (F-PDI Perjuangan) juga menyampaikan apresiasinya atas pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo. "Saya mengapresiasi pidatonya Pak Jokowi, yang mengatakan semangat Indonesia merdeka adalah berbagi. Berbagai kesejahteraan, pengetahuan, fasilitas di semua wilayah, pemerataan pembangunan," katanya

Keinginan presiden melakukan pemerataan pembangunan sangat disambut baik politisi fraksi PDI Perjuangan ini. Dia mengatakan jangan hanya Pulau Jawa yang dapat enaknya sementara tidak enaknya dibebani ke luar Pulau Jawa.

"Pembangunan harus merata, jangan hanya Pulau Jawa yang enak bebannya pualu lain. Beban dari kesejahteraan harus dibagi bersama. Merdeka adalah berbagi," pungkasnya. ■

(ria.mp), Foto: Arief/hr

Indonesia Masih Miliki PR Di Bidang Pendidikan

Indonesia telah menginjak usia ke 72 tahun. Perjalanan yang tak sebentar untuk sebuah negara. Di usia 72 tahun kemerdekaan Indonesia ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra memberikan catatan tentang makna kemerdekaan pendidikan bagi masyarakat yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita seluruh komponen bangsa.



Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

Kedua, tambah Sutan, terkait kesejahteraan pendidikan. Menurutnya, semua komponen pendidikan baik guru, murid dan pegawai sekolah harus menjalani fungsi pendidikan dengan sejahtera. Terutama kehadiran guru harus lebih dimuliakan dan diangkat harkat dan martabatnya secara baik.

"Ketiga, peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkelanjutan, hal ini penting untuk menunjang terbentuknya kualitas pendidikan di tanah air," imbuh politisi F-Gerindra itu.

Sutan berharap, di usia 72 tahun kemerdekaan Indonesia, pendidikan harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa. Sehingga bangsa ini maju dan sejajar dengan bangsa lain di dunia.

"Dirgahayu Republik Indonesia, jadikan pendidikan pilar kemajuan bangsa. Dunia pendidikan memegang peranan sentral dalam perjalanan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia," tutup politisi asal dapil Jambi itu. ■

(sf.mp), Foto: Anand/hr



<http://4.bp.blogspot.com/-pf1oh3dpCQg/T-ExpJiCtI/AAAAAAAAABg/DbsYJulbExI/s1600/pelajar.jpg>





Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR meninjau posko mobile Polres Pulau Buru yang berfungsi untuk berkomunikasi antar Polres.

Komisi III Soroti Kejahatan Narkoba di Maluku

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Polda Maluku mempertanyakan maraknya peredaran narkoba di daerah ini. Pasaunya, Maluku menempati peringkat ke 7 dari 34 provinsi di Indonesia dalam kasus peredaran narkotika. Selain kasus narkotika, kejahatan asusila di sini juga menjadi sorotan Komisi Hukum DPR ini.

“Kami ingin mengetahui sejauhmana Kepolisian Daerah Maluku mengatasi peredaran narkotika dan kejahatan asusila yang terjadi di Maluku,” kata Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaedi Mahesa saat pertemuan dengan Kapolda Maluku dan jajarannya, di Ambon, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, Maluku adalah daerah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara luar. Dengan letak geografis seperti ini rentan sekali barang seperti narkoba masuk ke Provinsi Maluku.

“Untuk itu Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Daerah Maluku untuk memperketat pengawasan dan melakukan operasi pemberantasan narkoba di wilayah Polda Maluku,” tegasnya.

Dalam kesemoatan tersebut, Kapolda Maluku Deden Juahra menyatakan bahwa di Maluku ternyata tidak hanya kasus kejahatan narkotika yang dominan. Kasus kejahatan tindakan asusila juga cukup banyak. Hal ini disebabkan budaya minum-minuman beralkohol masyarakat Maluku, yang sering mengakibatkan tindakan kriminal.

Menanggapi hal ini, Desmond menyatakan keprihatinannya. Ia berharap Polda Maluku dan jajarannya bekerja sama dengan pimpinan masyarakat mulai dari tingkat RT / RW maupun lurah, camat serta bupati dan gubernur untuk mencari solusi, agar masyarakat tidak melakukan kejahatan tersebut. ■

(andri), Foto: Andri/hr

Densus Tipikor Diharap Mampu Berantas Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan berharap, keberadaan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang dibentuk oleh Polri mampu memberantas korupsi di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu membantah konsiderans dalam Undang-undang KPK, yang menilai Kepolisian dan Kejaksaan Agung kurang mampu melakukan pemberantasan tipikor.



Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan

“Kepolisian dan Kejaksaan bukan kurang mampu, melainkan mereka terkendala oleh rendahnya anggaran.

Anggaran untuk penanganan korupsi, tidak bisa disamakan dengan perkara lain misalnya pembunuhan, narkoba, dan sebagainya,” tegasnya usai pertemuan dengan jajaran Polda Riau, Kejaksaan

Tinggi Riau dan BNN Provinsi Riau, di Pekanbaru, Senin (14/8).

Terkait hal tersebut, Komisi III DPR telah menyetujui anggaran untuk Densus Tipikor. “Oleh karena itu sesuai pengalokasian anggaran dalam hal perekrutan SDM di Densus Tipikor, kami menginginkan terdiri atas anggota-anggota

Polri terbaik yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia,” jelas politisi asal F-PDIP itu.

Sesuai informasi dari Kapolri dalam hal perekrutan, Kapolri sudah bekerja sama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait gaji. Besaran gaji yang akan diterima pun nantinya sama dengan gaji yang diterima oleh penyidik-penyidik Polri yang ada di KPK.

“Tapi persisnya seperti apa, kita tunggu saja nanti penjelasan resmi Kapolri dalam rapat dengan Komisi III di masa sidang mendatang. Informasi terakhir yang kami dapat, pada akhir tahun 2017 ini akan diresmikan. Jadi tinggal kita tunggu saja realisasinya. Semoga di bulan Desember ini bisa diresmikan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mendukung pembentukan Densus Tipikor untuk segera diresmikan. Ia turut mengusulkan di dalam penyidikan dan penyelidikan Densus Tipikor berada di satu atap demi kelancaran penanganan kasus.

“Saya kira ini sebuah pemikiran yang bagus tetapi tentu lebih bagus lagi jika penyidikan dan penuntutan berada di lingkup yang sama tidak terpisahkan. Ada baiknya untuk kelancaran dari proses penanganan Tipikor ini mungkin dijadikan satu atap. Maksud saya supaya tidak bolak-balik dalam hal pemenuhan berkas-berkas,” ucapnya.

Kunjungan Kerja Komisi III DPR turut dihadiri oleh Mohammad Toha (F-PKB), Aboe Bakar Al Habsyi, Tifatul Sembiring (F-PKS), Junimart Ginsang, Marsiaman Saragih (F-PDIP), Hasrul Azwar (F-PPP), Taufiqulhadi (F-Nasdem), dan Abdul Dalimunthe (F-Demokrat). ■

(tra.mp), Foto: Tiera/ht

Pengakuan Niko Terbukti Rumah Sekap Memang Ada

Setelah melihat secara langsung fisik bangunan yang disebut sebagai rumah sekap, akhirnya Pansus Angket KPK memastikan bahwa yang disebut rumah sekap oleh Niko Panji Tirtayasa itu memang ada.

“Setelah kita lihat, benar ada rumah tersebut. Dengan demikian apa yang disampaikan Niko tentang rumah sekap memang ada!” tandas Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi di kawasan Depok, Jawa Barat, Jum’at (11/8).

Taufiqulhadi menegaskan bahwa pansus tidak setuju dengan kata-kata safe house. Sebab menurutnya kata safe house itu tidak ada dalam nomenklatur undang-undang. “Tapi kalau safe house yang dimaksud adalah untuk mengamankan saksi, maka hal itu harus berada di bawah LPSK. LPSK itulah yang menjalankan

Pansus Angket KPK Sambangi Rumah Sekap di Depok dan Kelapa Gading

Usai melihat langsung kondisi fisik rumah aman (*safe house*) KPK yang ditunjukkan oleh saksi Niko Panji Tirtayasa, Pansus Hak Angket KPK menegaskan bahwa ternyata dalam faktanya kondisi bangunan itu tidaklah seperti sebuah *safe house* yang telah diutarakan oleh pihak KPK tentang rumah aman.

Pasalnya, persoalan rumah aman tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kriteria, prosedur dan mekanismenya diatur dalam undang-undang. Demikian ditegaskan Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa di depan lokasi rumah sekap di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jum'at (11/8).

"Berdasarkan keterangan Niko, rumah ini ternyata ada korelasinya dengan perkara pilkada. Dia (orang yang terkait perkara pilkada tersebut-red) itulah yang membiayai. Lantas bagaimana ini bisa dikatakan rumah aman," ucapnya.

Agun memaparkan bahwa dirinya telah menanyakan kepada Niko, mengapa ia (Niko) mau untuk melakukan itu semua, dan jawaban Niko adalah karena ia dibawa dari daerah Pangandaran dalam kondisi keluarganya terancam.

"Tujuan kedatangan pansus ke sini untuk membuktikan kebenaran pernyataan Niko tentang rumah sekap tersebut, dan ternyata memang benar," ujarnya.

Agun yang didampingi beberapa

anggota pansus dan juga Niko saat meninjau keberadaan rumah sekap di wilayah Depok dan Kelapa Gading, kembali menanyakan langsung dihadapan awak media, apakah betul rumah tersebut yang dimaksudkan olehnya saat memberikan keterangan dalam RDPU dengan Pansus Angket KPK di Gedung DPR, dan dijawab tegas oleh Niko, betul. "Warna catnya masih asli?," Tanya Agun kepada Niko dirumah sekap kedua yang dikunjungi pansus di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Masih asli hijau pak," jawab Niko.

"Yang terpenting kami sudah menegaskan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Niko pada hari ini semakin menambah kekuatan pansus. Hingga pada waktunya kita akan melakukan konfrontasi dengan pihak KPK, termasuk dengan sejumlah orang-orang yang sudah disebutkan," tuturnya.

Tugas Pansus KPK adalah melakukan langkah penyelidikan tentang tugas dan kewenangan KPK, apakah yang dikerjakannya patuh pada peraturan perundang-undangan. "KPK tidak usah

semua tugas tersebut," ujarnya.

Taufiqulhadi juga mengatakan, apabila KPK menyatakan maksudnya itu untuk mengamankan, maka hal itu akan menjadi tanda tanya besar. "Apakah diamankan untuk diamankan fisiknya atau untuk dicuci otaknya. Kalau seseorang ditempatkan di rumah ini, berarti itu rumah sekap. Dan ternyata memang ada tempatnya," ucap politis F-Nasdem itu.

"Yang paling penting bagi kita," sambungnya lagi, "bukan persoalan untuk mencari *safe house* ataupun rumah sekap, tetapi benar atau tidak benda atau rumah yang dimaksud seperti yang telah disebutkan Niko," pungkasnya. ■

(depmp), Foto: Arief/hr



Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa bersama Niko

berpolemik di media, sebaiknya datang ke pansus. Bila benar katakan benar, kalau salah katakana salah adanya," lanjut Agun.

"Kita bukan ingin memperburuk, tapi mari kita berangkat dari itikad dan niat yang sama. Inilah peluang buat kita untuk kembali menggugah semangat Proklamasi 17 Agustus, demi kemerdekaan, bebaskan rakyat Indonesia dari segala ancaman dan tekanan dalam sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Kita tidak usah lagi bersilat lidah, Niko siap dijadikan tersangka atas keterangannya, Kami di pansus juga siap mempertanggungjawabkan atas apa yang kami lakukan. Mari kita duduk bersama, berdiskusi membicarakan sebuah kebenaran untuk sebuah keadilan yang didambakan seluruh rakyat," pungkasnya. ■

(dep), Foto: Arief/hr



Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi

Komisi IV Janji Perjuangkan Aspirasi Kades di Boalemo



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono didampingi kepala desa se-Kabupaten Boalemo mengunjungi Museum DPR RI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono berjanji akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan para kepala desa se-Kabupaten Boalemo, Gorontalo yang hadir di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (09/8).

“Insyah Allah saya akan memperjuangkan dan mewujudkan permintaan dan harapan yang bapak ibu kepala desa sampaikan tadi. Karena bapak dan ibu sudah memilih dan mempercayai saya sebagai wakil rakyat dari Gorontalo. Tentunya aspirasi yang disampaikan tadi merupakan keinginan dan kebutuhan dari seluruh masyarakat yang ada di desa bapak dan ibu masing-masing,” ungkap Roem Kono.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat Boalemo melalui kepala desanya masing-masing itu diantaranya berupa belum adanya asuransi pertanian di Desa Karya Murni. Padahal para nelayan sudah mendapatkan asuransi nelayan. Asuransi

bagi petani ini menurut Kepala Desa Karya Murni, Usman ini sangat diperlukan sebagai antisipasi jika terjadi gagal panen atau hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada diri para petani.

Melalui Roem Kono, Usman juga berharap agar DPR mendorong pemerintah daerah untuk segera memberikan bantuan kepada para korban banjir bandang yang terjadi di desa tersebut beberapa hari yang lalu. Akibat banjir tersebut tanggul menjadi rusak alias jebol, dan jalan desa pun terkikis. Hal ini menyulitkan warga desa yang ingin beraktivitas.

Terkait hal tersebut politisi dari Fraksi Partai Golkar ini berjanji akan

langsung menyalurkan aspirasi tentang asuransi pertanian tersebut kepada Kementerian Pertanian sebagai mitra kerjanya. Sementara untuk korban banjir bandang, pihaknya akan langsung meminta pemerintah setempat untuk segera memperbaiki tanggul yang rusak. Bahkan Roem Kono pun tidak segan untuk menghubungi Dirjen Bina Marga untuk segera memperbaiki jalan desa yang terkikis.

“Saya akan langsung sampaikan aspirasi tersebut kepada instansi terkait yang merupakan mitra kerja kami di Komisi IV ini. Namun sebelumnya, saya minta proposal pengajuan bantuan itu untuk segera disusun dan diberikan kepada kami, agar dapat langsung kami sampaikan kepada instansi terkait tadi. Insya Allah saya akan terus mengawal hal ini sampai masyarakat benar-benar mendapatkan fasilitas dan sarana juga prasarana yang memadai,” papar Roem.

Tidak hanya itu, Politisi asal Gorontalo ini juga mendapatkan pengaduan terkait minimnya ketersediaan pupuk di Desa Boalemo. Padahal itu sangat diperlukan bagi masyarakat sekitar yang notabene berprofesi sebagai petani. Begitupun halnya dengan ketersediaan bibit rumput laut di Desa Kramat yang sangat diperlukan untuk budidaya rumput laut. Petani rumput laut belum mampu mengolah budidaya yang menjadi mata pencahariannya itu secara profesional.

Menanggapi hal itu, Roem Kono berjanji akan memperjuangkan dan mengirimkan pupuk dan bibit yang dibutuhkan masyarakat kedua desa tersebut. Oleh karena itu selain meminta proposal pengajuan atau permintaan bibit dan pupuk, Roem Kono juga berharap agar masyarakat mampu mengolah bantuan yang akan diberikan tersebut secara benar. Sehingga kelak apa yang dihasilkannya tersebut dapat meningkatkan penghasilan dan perekonomian masyarakat di Boalemo. ■

(Ayu/mp), Foto: Kresna/hr



Anggota Komisi XI DPR, Indah Kurnia.

Indah Kurnia Gelar Konser Keberagaman Itu Indah

Semangat menjunjung tinggi keberagaman sudah ditanamkan sejak ia masih kecil, bahkan Indah Kurnia yang lahir di lingkungan Nasrani ini pernah menjadi vokalis utama grup Qasidah modern Giri Nada pada tahun 1979. Tak hanya dia, pemain bass Qasidah itu pun seorang Katolik dan Keyboardistnya pemeluk ajaran Hindu. Menurutnya, dengan latar belakang agama yang berbeda-beda itulah justru menjadi spirit tersendiri bagi dirinya untuk menghargai sesama.

Dengan alasan itu, memasuki usia ke-55 tahun, Anggota Komisi XI DPR RI ini menggelar konser kemerdekaan dengan mengangkat tema “Keberagaman Itu Indah” berkolaborasi dengan Komposer Addie MS dan Twilite Orchestra di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (11/8).

“Tema itu adalah tagline saya sejak terjun di dunia politik yang menggambarkan kehidupan saya yang selalu beragam dan keberagaman itu indah,” ungkap Indah Kurnia yang dikenal konstituennya sebagai sosok yang lintas batas.

Selama kurang lebih 3 jam, Indah bersama Addie Ms mempersembahkan lagu-lagu patriotik Indonesia dan lagu daerah. Lantunan melodi yang indah memukau penonton yang tak sedikit dihadiri oleh Anggota DPR, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan sejumlah mitra Komisi XI DPR RI.

Selain itu, politisi PDI-Perjuangan pemegang rekor MURI menyanyikan 714 lagu tanpa teks selama lima hari berturut-turut ini juga berharap dengan adanya konser ini, dapat menjadi semangat baru untuk generasi muda sekarang untuk tidak mengesampingkan nilai-nilai persatuan sebagaimana semboyan bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika.

“Kita tidak ingin menggunakan perbedaan menjadi suatu masalah, sebaliknya dijalin bersama, dirajut menjadi sesuatu yang sangat indah,” tandasnya.

Hal senada disampaikan oleh rekannya di Komisi XI Mukhamad Misbakhun yang hadir dalam acara tersebut, ia menilai keberagaman adalah sebuah keniscayaan negara besar Indonesia. Beragam dari budaya, etnik, seni dan bahasa.

“Mudah-mudahan tema ini membangkitkan nasionalisme kita, membangkitkan kesadaran kita tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda keberagaman tetapi satu cita-citanya yaitu Indonesia yang lebih baik,” ungkapnya. ■

(ann.sc) Foto: Kresno/hr

DPR Desak BUMN Dukung Program Pemprov

DPR RI mendesak berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah untuk mendukung program pemerintah provinsi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (F-PG) mengatakan bahwa banyak persoalan yang menghambat kemajuan Sulawesi Utara dikarenakan BUMN yang ada kurang bersinergi dengan pemerintah setempat.



Tim Kunker Komisi VI DPR RI bersama Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey

“DPR mendukung program pemerintah Sulawesi Utara, khususnya di bidang pariwisata yang akan mendatangkan 10.000 turis yang harus menyediakan fasilitas Airport yang betul-betul mendukung. Karena itu kami akan minta BUMN Angkasa Pura I untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan rencana tersebut,” ungkap Bowo pada pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran Dinas Perdagangan Perindustrian

Koperasi dan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (9/8).

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan bahwa target yang diajukan pemerintah mengenai masuknya turis yang masuk ke Sulawesi Utara sejumlah 10 ribu orang mengalami beberapa kendala, antara sistem imigrasi yang secara kesiapan belum sesuai dengan standar. “Ada penerbangan datang jam enam pagi tetapi petugas baru datang jam delapan, sehingga turis internasional harus menunggu dua jam. Dari awal

pelayanan ini sudah tidak memenuhi,” ungkap Olly. Dijelaskannya keadaan ini terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan ketidakterediaan ruang istirahat untuk petugas.

Selain itu Olly mengeluhkan masih sering terjadi pemadaman listrik di Sulut. “Bagaimana kita mau dorong UMKM, kalau listrik masih sering mati? Memang kita mendapatkan surplus 45 megawatt listrik, tapi tetap masih terdapat kekurangan supply listrik di beberapa tempat,” ungkap Olly lagi.

Keluhan ini langsung disampaikan Anggota Komisi VI Vanda Sarundajang (F-PDI Perjuangan) di pertemuan selanjutnya dengan BUMN Sulawesi Utara yang dihadiri antara lain PLN, Pertamina dan Bulog.

“Selama ini masih belum tergambar, tidak disebutkan benar-benar kendalanya apa, *maintenance* nya kah, mesin-mesin yang usang dari zaman Belanda atau genset apa yang harusnya diganti. Perlu solusi nyata, karena setiap kami datang ke masyarakat selalu ujung-ujungnya permasalahan tentang PLN,” ujar Vanda yang merupakan anggota dewan Dapil Sulut.

Sebelumnya pemerintah pusat telah membantu mengirimkan Kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) Karadeniz Powership Zeynep Sultan berkapasitas 120 Mega Watt (MW) milik Turki untuk mendukung listrik di Sulut dan Gorontalo. Tetapi di kemudian hari ternyata pemadaman listrik masih saja terjadi.

“Jadi mohon perhatian PLN jangan selalu menyalahkan faktor luar seperti pohon tumbang, angin ribut dan sebagainya dalam masalah ini. Kalau perlu semua duduk bersama untuk menemukan permasalahan dan apa-apa yang sebenarnya dibutuhkan,” pungkas Vanda. ■

(ran,mp). Foto: Rizka/hr

Pembangunan Pariwisata Harus Berorientasi Pengembangan Wilayah

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis nasional sebagai penyumbang devisa, instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus menggunakan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Anggota DPR RI Komisi X Ridwan Hisjam menekankan, ada beberapa poin penting dalam membangun pariwisata khususnya di daerah, dengan berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat



memberdayakan masyarakat dan lembaga.

“Kepariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Hal itu pun untuk meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Ridwan, dalam rilisnya kepada Parlemen, Senin (14/8).

Ridwan menambahkan, berdasarkan penjelasan pasal 7 huruf D UU No. 10 tentang Kepariwisata secara tegas dan eksplisit menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, namun harus melibatkan berbagai pihak, khususnya pihak swasta dan masyarakat.

“Kerjasama dengan berbagai pihak tersebut tentu sangat penting untuk meningkatkan promosi pariwisata Indonesia,” imbuh politisi F-PG itu.

Di sisi lain, Ridwan juga mendesak Kementerian Pariwisata untuk melakukan langkah konkrit dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas penguatan program 10 destinasi wisata prioritas. Program promosi pengembangan pariwisata itu harus mengacu pada peta jalan, dan didukung dengan kesiapan sumber daya manusia, kesadaran masyarakat atas sadar wisata.

“Untuk promosi, bisa dengan model lain. Misalnya tidak lewat iklan, tetapi mengajak partisipasi masyarakat atau kampus dan pemangku kepentingan yang bersifat afirmatif,” tutup politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Diketahui, pemerintah menargetkan beberapa poin penting untuk kepariwisataan di tahun 2017, diantaranya kontribusi pada PDB Nasional sejumlah 13 persen, sumbangan devisa sebesar Rp 200 triliun, dan jumlah tenaga



Anggota DPR RI Komisi X, Ridwan Hisjam

kerja sebanyak 12 juta orang. Selain itu, kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan 15 juta kunjungan, dan perjalanan wisatawan nusantara sebanyak 265 juta perjalanan. ■

(sf/mp), Foto: Jaka/hr

Komisi V Apresiasi Pengembangan Konektivitas Infrastruktur Maluku

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena mengapresiasi pengembangan konektivitas serta peningkatan sarana dan prasarana di Maluku khususnya dan pengembangan proyek strategis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada umumnya. Hal tersebut disampaikan Wattimena saat melakukan kunjungan kerja dalam bersama 15 anggota Komisi V DPR ke Maluku, baru-baru ini.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena

Dalam kunjungannya yang didampingi Dirjen Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, Michael menyatakan, pembangunan harus dilakukan secara merata hingga ke wilayah timur Indonesia, dengan terarah dan sinergis agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Kunker ini salah satu cara kami dalam menampung aspirasi dari daerah dan mencari tahu masalah yang terjadi, sehingga dapat dikomunikasikan penyelesaiannya dengan instansi terkait,” tutur Michael.

Pada kesempatan tersebut, Tim Kunker melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur seperti Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Sesar Bula, Pelabuhan Kaiwatu, Pelabuhan Wonreli, serta bandara yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur.

Dirjen Tonny Budiono menambahkan bahwa keberadaan transportasi laut menjadi tulang punggung masyarakat Maluku. Untuk itu, pemerintah terus berupaya membangun konektivitas pada wilayah Maluku, diantaranya melalui penyelenggaraan angkutan laut perintis, angkutan penumpang, dan Tol Laut.

“Saat ini angkutan kapal perintis yang melayani masyarakat di Provinsi Maluku sebanyak 18 trayek, yang beroperasi dari pelabuhan pangkal Ambon, Tual dan Saumlaki,” ujar Tonny.

Untuk penempatan kapal perintis baru di Maluku, pihaknya akan menempatkan 13 kapal perintis dengan tipe 1.200 GT sebanyak empat unit kapal dan tipe 2.000 GT sebanyak sembilan unit kapal untuk Pangkalan Ambon, Pangkalan Tual, dan Pangkalan Saumlaki.

Sementara untuk kapal penumpang, lanjut Tonny, pemerintah menyediakan sembilan kapal Pelnis yakni KM. Tidar, KM. Dorolonda, KM. Nggapulu, KM. Sirimau, KM. Leuser, KM. Pangrango, KM. Sangiang, KM. Dobonsolo, dan KM. Gunung Dempo. “Tahun 2017 kami memberikan PSO (Public Service Obligation) untuk 26 kapal Pelnis dengan jumlah pelabuhan singgah sebanyak 89,” imbuhnya. ■

(ds/mp), Foto: Ds/hr

Riset GIZ Diharapkan Mampu Klarifikasi Penilaian Negatif Terhadap DPR

Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi riset yang telah dilakukan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang menggunakan metode berdasarkan standar akademik. Sehingga diharapkan riset ini akan mampu mengklarifikasi asumsi berbagai pihak yang selalu menganggap DPR sebagai lembaga yang tidak transparan.



Wakil Ketua DPR Korkesra, Fahri Hamzah didampingi Kepala BKD DPR, Johnson Rajagukguk dalam acara Dialektika Demokrasi.

Ada empat aspek yang menjadi tolok ukur dalam penelitian tersebut yakni kewenangan parlemen dalam anggaran, kesesuaian laporan keuangan tahunan dengan dokumen pendukung, kelengkapan laporan anggaran tahunan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada parlemen.

Fahri menilai, otoritas parlemen dalam *budgeting* itu sangatlah penting, terlebih transparansi parlemen juga sangat dibutuhkan dalam penyusunan anggaran sehingga masyarakat pun bisa dengan mudah melakukan partisipasi dan menyampaikan usulan pendapat. "Kita tahu bahwa otoritas parlemen dalam *budgeting* itu penting. Makin demokratisnya negara maka peran parlemen dalam menyusun anggaran itu besar," sambung Fahri.

Tak hanya selalu melibatkan masyarakat, DPR pun dalam menyelenggaraan berbagai rapat selalu mengutamakan prinsip keterbukaan sehingga masyarakat bisa dengan mudah menyaksikan secara langsung berbagai macam rapat di DPR. Keterbukaan aktivitas di DPR ini yang tidak mudah ditemukan di parlemen negara lain.

Dari hasil penelitian GIZ, dibandingkan negara ASEAN lain, transparansi anggaran parlemen Indonesia menjadi yang tertinggi. Setelah Indonesia, disusul Philipina, Vietnam, Laos, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan terakhir Brunei Darussalam. ■

(ns), Foto: Rumiftr

“Ini bisa mengklarifikasi banyak hal. Apa yang dicapai dari penelitian GIZ ini risetnya serius. Ini bukan LSM plat merah. Mereka risetnya detail,” ujar Fahri dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Diketahui, hasil penelitian *Parliamentary Budgeting and Transparency* yang dilakukan oleh

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyatakan DPR menjadi lembaga legislatif yang paling transparan dalam penggunaan anggaran se-Asia Tenggara. DPR pun juga menjadi lembaga yang paling aktif dalam mengutamakan keterbukaan serta partisipasi publik sejak proses perencanaan hingga penyusunan anggaran.

Selama Penyusunan Anggaran DPR Selalu Terbuka dan Transparan



Kepala BKD DPR, Johnson Rajagukguk dalam acara Dialektika Demokrasi.



DPR yang menempati peringkat pertama dalam transparansi anggaran se-ASEAN versi penelitian Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menjadi kebanggaan tersendiri. Ini menandakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia sudah sangat baik. Hasil penelitian ini juga menepis anggapan yang mengatakan DPR sebagai lembaga yang kurang transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk menegaskan bahwa DPR selalu terbuka dalam menyelenggarakan rapat-rapat yang membahas perencanaan keuangan, sehingga hal wajar ketika GIZ menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang paling transparan dalam fungsi *budgeting* se-ASEAN.

“Kita di peringkat pertama dalam transparansi. Karena dalam prosesnya kita selalu menjalankannya peraturan. Keterbukaan kita tidak hanya pengelolaan anggaran, seluruh kegiatan di DPR selalu terbuka. Ini yang berbeda dengan parlemen di negara lain,” ujar Johnson dalam acara Dialektika Demokrasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Johnson menjelaskan keterbukaan DPR terlihat sejak awal-awal ingin menyusun undang-undang yang selalu menghimpun masyarakat sejak proses penyusunan program legislasi nasional (prolegnas). “Kita sejak penyusunan program legislasi nasional hingga penyusunan dan pengesahan selalu terbuka sehingga tidak ada yang ditutupi,” sambungnya.

Melihat capaian ini dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yakin bahwa alam demokrasi Indonesia telah masuk dalam capaian yang hebat sehingga hal ini harus diteruskan. “Dari sisi performancenya demokrasi, kita hargai Indonesia memasuki fase yang hebat,” tutur Fahri.

Hal ini pun menepis tuduhan publik yang menilai DPR sebagai lembaga yang kurang transparan. Oleh karena itu penilaian objektif sebagaimana yang dilakukan GIZ ini patut diapresiasi agar demokrasi yang berlangsung tidak digiring melalui opini dan asumsi publik yang tidak benar. ■

(ris), Foto: Rumi/hr

Para Teladan Harapkan Kesejahteraannya Ditingkatkan

Sabarudin Ilyas salah satu teladan yang hadir untuk menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-72 Tahun 2017, mengutarakan harapannya agar di hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT DPR ke 72 kesejahteraan tenaga perawat dapat ditingkatkan. Ia hadir bersama-sama para teladan lain dari beberapa instansi seluruh Indonesia menyaksikan langsung peringatan HUT-RI di Jakarta.

“Saya mengucapkan HUT RI dan HUT DPR ke 72, semoga ke depan lebih baik. Tetap maju Republik Indonesia dan DPR RI. Kami berharap, semoga tenaga perawat yang merupakan garda terdepan, bisa diperhatikan kesejahteraannya,” ungkap Sabarudin di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08).

Sabarudin berterimakasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah memberi kesempatan para teladan untuk hadir di Gedung DPR menyaksikan Pidato Kenegaraan. “Kami senang sekali bisa datang ke gedung bersejarah ini, selamat ini hanya bisa melihat di televisi, tapi sekarang dapat duduk di tengah-tengah orang hebat. Kami sangat bersyukur,” katanya.

Sabarudin adalah teladan di bidang kesehatan yang didatangkan dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dia menjadi perawat teladan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. “Ada program dari Kemenkes untuk menghargai para teladan-teladan yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat. Dari 13 kabupaten saya terpilih sebagai utusan tenaga perawat teladan tahun ini,” tuturnya.

Ia menjelaskan inovasi yang telah dilakukan hingga mengantarkannya hadir di Gedung DPR. Dirinya telah membentuk Kader Bakhti Husada dan Pos UKK yang memberdayakan masyarakat, juga membentuk tim reaksi gerak cepat, di puskesmas.

“Kami buat inovasi ambulans gratis, membentuk tim reaksi gerak cepat. Jadi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan 24 kami stand by dan siap menjemput. Kami juga ada gerakan menyelamatkan bayi dan ibu hamil, karena diketahui jarak dari kabupaten ke kota provinsi harus menempuh 18 jam,” pungkasnya mewakili 275 teladan bidang kesehatan yang hadir dalam acara menyambut HUT ke 72 RI. ■

(ria.mp), Foto: Kresno/hr



Teladan Bidang Kesehatan, Sabarudin Ilyas

Sekjen DPR Pantau Persiapan Pelaksanaan Sidang Tahunan

Sekjen DPR RI Achmad Djuned melakukan pantauan langsung acara gladi kotor persiapan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018. Pelaksanaan gladi kotor itu juga sebagai bagian dari upaya mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian acara tersebut.

“Hari ini ada pelaksanaan tiga gladi kotor, yang pertama gladi kotor untuk Sidang Tahunan MPR, kedua, gladi kotor Sidang Bersama DPR dan DPD RI, dan yang ketiga gladi kotor Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018. Kesiapannya sudah cukup bagus, dan nanti akan dilanjutkan

dengan gladi bersih,” ucap Djuned di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/08/2017).

Djuned menjelaskan, seluruh rangkaian acara yang akan dilakukan sama dengan sidang tahunan sebelumnya. “Karena semua sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yaitu UU MD3. Hanya

penyelenggaranya saja yang setiap tahun bergantian,” ujarnya.

Sementara itu, suasana ruangan tempat berlangsungnya acara juga sudah mendapat sentuhan dekorasi, di dalam Gedung Nusantara sudah dihias dengan bunga berwarna merah dan putih. ■

(dep) Foto: Rumi/hr



Sekjen DPR RI Achmad Djuned memantau acara gladi kotor persiapan Sidang Tahunan DPR



Suasana Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD

Pertumbuhan Ekonomi 2018 Ditargetkan 5,4 Persen

Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 5,4 persen. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang optimis ini didukung melalui konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan menyangkut RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya di DPR, Rabu (16/8). “Pada 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional.”

Presiden menyebut, peningkatan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi jadi kunci pemerataan ekonomi. Penghambatan daerah perbatasan juga jadi prioritas pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional. Pemberdayaan daerah perbatasan ini diharapkan mampu mengembangkan perekonomiannya

sendiri sekaligus perekonomian nasional.

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu, Presiden juga bicara soal inflasi yang diperkirakan terjaga pada 3,5 persen. Ini perlu dukungan perbaikan kapasitas produksi nasional, stabilitas harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan Rp13.500 per dolar Amerika Serikat. Baik pemerintah, BI, dan OJK telah membangun upaya penguatan di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan pada 2018 diperkirakan 5,3 persen. Asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD 48 per barel. Volume minyak dan gas bumi yang siap jual selama 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak

per hari.

“Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi di tahun 2018,” kata Presiden. Sedangkan strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dengan fokus keadilan sosial.

Yang menarik pula dalam pidato Presiden ini adalah tentang belanja negara 2018 yang direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun. Belanja ini diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. ■

(mh/mp), Foto : Ds/hr



Pimpinan DPR RI menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam agenda Sidang Tahunan DPR di Gedung Paripurna, Rabu (16/8). Foto: Jaka,Runi

Pimpinan DPR RI mendampingi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki ruang sidang paripurna DPR, Rabu (16/8). Foto: Andri,Jay



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan membacakan doa saat Sidang Tahunan DPR di Gedung Paripurna DPR, Rabu (16/8). Foto: Andri,oji